

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI
MANAJEMEN KUNCI**

(Tesis)

Oleh

UMARUDIN KURNIAWAN



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran struktur Corporate Governance yang memengaruhi tingkat pengungkapan wajib mengenai kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2014) tentang Pihak-pihak Berelasi. Struktur CG yang diteliti adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, dan efektivitas komite audit, serta faktor lain seperti kualitas audit KAP dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Penelitian ini memperbaiki pengukuran variabel kepemilikan manajerial. Sampel dari penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2016.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hanya dua hipotesis (variabel Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit KAP) yang terdukung dan tiga hipotesis (variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, dan Efektivitas Komite Audit) tidak terdukung.

Kata Kunci : *corporate governance*, pengungkapan, kepemilikan manajerial, Kepemilikan Keluarga, efektivitas komite Audit, Ukuran Perusahaan, kualitas audit, transaksi pihak berelasi.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of Corporate Governance structures that affect the level of mandatory disclosure of key management compensation in the financial statements in accordance with PSAK No.7 (Revised 2014) concerning Related Parties. The CG structures studied are family ownership, managerial ownership, and audit committee effectiveness, as well as other factors such as the quality of KAP audit and firm size against the key level of disclosure of key management compensation in the financial statements. This study improves the measurement of managerial ownership variables. The sample of this research is Banking Company which listed in Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2016.

Based on the results of multiple regression analysis show that only two hypotheses (Firm Size and Audit Quality) are accepted and three hypotheses (Managerial Ownership variable, Family Ownership, and Audit Committee Effectiveness) are rejected.

Keywords : corporate governance, disclosures, Managerial Ownership, Family Ownership, Audit Committee Effectiveness, Firm Size, Audit Quality related party transaction

**PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI
MANAJEMEN KUNCI**

Oleh

UMARUDIN KURNIAWAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI**

Nama Mahasiswa : Umarudin Kurniawan

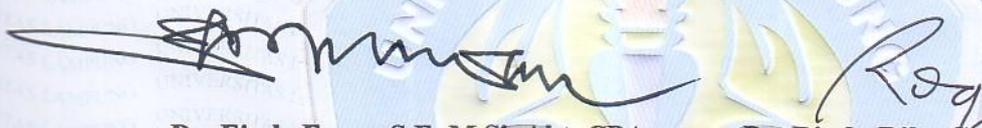
Nomor Pokok Mahasiswa : 1421031013

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Einda Evana, S.E., M.Si., Akt., CPA
NIP 19750620 200012 2 001

Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si.
NIP 196911282000122001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

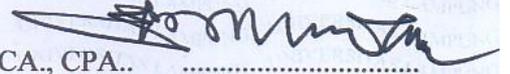


Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

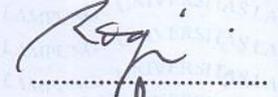
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

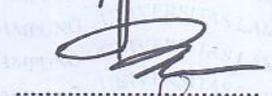
Ketua : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA..



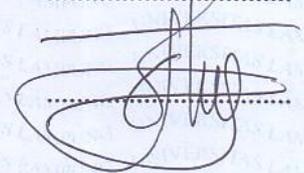
Sekretaris : Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si



Penguji Utama : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt



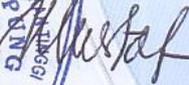
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 196109041987031011



Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci” adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak atas intelektual atas karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat adanya kekeliruan, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2018

Pembuat Pernyataan



Umarudin Kurniawan
NPM 1421031013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nambahrejo, pada tanggal 3 November 1990 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ngatijo dan Ibu Wariyem.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Taman Kanak-kanak Negeri Nambahrejo yang diselesaikan pada tahun 1996, Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Nambahrejo dan diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Punggur pada tahun 2005, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Akuntansi program Strata I Universitas Lampung pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013. Penulis diterima sebagai mahasiswa pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur seleksi reguler.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohiim,

Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti penulis ucapkan kepada Tuhan Ku Maha Besar Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan sebuah karya kecil ini. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di kemudian hari.

Tesis dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci”** ini dapat diselesaikan. Diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan untuk topik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada khususnya.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., selaku Pembimbing utama, terima kasih atas segala masukan, saran, dan ilmu yang sangat membantu selama proses penyusunan tesis ini;
5. Ibu Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Lampung dan selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas segala diskusi dan motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini;
6. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt selaku Penguji utama;
7. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt., selaku Sekretaris Penguji;
8. Para Dosen dan staf program studi akuntansi, yang tidak disebutkan namanya terimakasih atas ilmu dan wawasan yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada ibuku yang sangat aku sayangi juga ayahku yang sangat aku cintai terima kasih atas kepercayaan dan tempaan pendidikan awal dari rumah dan juga kasih sayang dan perhatian yang tiada henti-hentinya di berikan kepadaku.
10. Kepada kakak dan adikku serta seluruh keluargaku yang tercinta, yang selalu aku banggakan, yang selama ini tetap menyayangiku, dan mendoakan keberhasilanku, serta memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini baik secara material maupun spiritual.
11. Bapak Weddie Andriyanto, S.E., Akt., CA., CPA. yang dulu pernah menjadi Dosenku saat aku menempuh pendidikan Strata 1 yang kemudian menjadi Atasanku di kantor tempatku bekerja sekarang. Terimakasih karena selalu menyempatkan waktu untuk memberi semangat dalam menyelesaikan Tesisku.

12. Teman-teman sekantorku, Fikri, Fakhur, Rexy, dan teman-teman sekantorku yang lainnya.
13. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan tahun 2014.
14. Semua jajaran Prodi Akuntansi dan segenap dosen Unila serta seluruh karyawan yang tidak berhenti mensupport aku untuk terus maju.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang dengan ikhlas memberikan kesempatan untuk diri ku menggali ilmu.

Demikian kiranya yang dapat peneliti sampaikan. Mohon maaf atas segala sesuatu yang tidak berkenan. Semoga pembaca sekalian dapat memperoleh manfaat dari tesis ini. Terima Kasih.

Bandar Lampung, Juni 2018
Peneliti

Umarudin Kurniawan

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan
untuk kedua Orang tuaku tercinta dan adik-adikku
tersayang, serta seluruh keluargaku yang selalu aku sayangi
yang selalu mendukung dan mendo'akanku.*

*Tak lupa kepada sahabat-sahabatku yang slalu mendukung
dan menemaniku sehingga aku dapat menyelesaikan
penelitian ini.*

MOTTO

Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS.Al-Mujadilah:11)

Ilmu dan amal adalah saudara kembar, ibu keduanya adalah kuatnya kemauan. Kenodohan dan pengangguran adalah saudara kembar, ibu keduanya adalah menuruti kemalasan (Ibnul Qayyim, Badai'ul Fawaid, 3/747).

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Pengambilan Sampel Penelitian	41
4.2. Daftar Perusahaan Perbankan di BEI yang menjadi Sampel	42
4.3. Statistik Deskriptif	43
4.4. Hasil Uji Multikolinearitas	46
4.5. Hasil Uji Autokorelasi	47
4.6. Hasil Regresi OLS	49
4.7. Hasil Uji F	50
4.8. Hasil Adjusted R-Square	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran	25
4.1. Hasil Uji Normalitas	45
4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Sampel Penelitian
2. Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian
3. Lampiran 3 : Hasil Olah Data Output SPSS 19
4. Lampiran 4 : Daftar *Checklist* Efektivitas Komite Audit (Hermawan 2009)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	8
2.1. Tinjauan Pustakan	8
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	8
2.1.2. Teori <i>Stakeholders</i>	9
2.1.3. PSAK No. 7 (Revisi 2014)	10
2.1.4. Kompensasi Manajemen Kunci	11
2.1.5. <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.6. Kepemilikan Manajerial	16
2.1.7. Kepemilikan Manajerial	17
2.1.8. Efektivitas Komite Audit	18
2.1.9. Kualitas Audit	20
2.1.10. Ukuran Perusahaan	21
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran	24

2.4. Pengembangan Hipotesis	25
2.4.1 Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Manajemen Kunci	25
2.4.2 Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci	26
2.4.3 Efektivitas Komite Audit dan Pengungkapan Manajemen Kunci	28
2.4.4 Kualitas Audit dan Pengungkapan Manajemen Kunci	29
2.4.5 Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Manajemen Kunci..	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Sampel Penelitian	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.4. Pengukuran Variabel	33
3.4.1. Variabel Dependen (Y)	33
3.4.2. Variabel Independen (X)	34
3.5. Model Penelitian	36
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	36
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	36
3.5.2.1 Uji Normalitas Data	36
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	37
3.5.2.3 Uji Autokorelasi	37
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	38
3.5.2.5 Koefisien Determinasi.....	39
3.5.2.6 Uji Kelayakan Model Regresi.....	39
3.5.3 Pengujian Hipotesis	39

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1. Gambaran Objek Penelitian	41
4.2. Analisis Data	43
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	43
4.3. Uji Asumsi Klasik	45
4.3.1 Uji Normalitas Data	45
4.3.2 Uji Multikolinearitas	46
4.4.3 Uji Autokorelasi	47
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas	47
4.4. Pengujian Model Regresi	48
4.4.1. Uji Kelayakan Model (Uji-F)	49
4.4.2. Kooefisen Determinasi	50
4.5. Pengujian Hipotesis (Uji-t)	51
4.6. Pembahasan dan Hasil Analisis	53
4.6.1. Kepemilikan Manajerial dan Tingkat Pengungkapan Manajemen Kunci	53
4.6.2. Kepemilikan Keluarga dan Tingkat Pengungkapan Manajemen Kunci	54
4.6.3. Efektivitas Komite Audit dan Tingkat Pengungkapan Manajemen Kunci	55
4.6.4. Ukuran Perusahaan dan Tingkat Pengungkapan Manajemen Kunci	56
4.6.5. Kualitas Audit dan Tingkat Pengungkapan Manajemen Kunci	57

V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Ketebatasan Penelitian	60
5.3 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Sebagai contoh, entitas sering melaksanakan bagian kegiatannya melalui entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Dalam keadaan ini, entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan. Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas, pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi dimana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Sebagai contoh, entitas yang menjual barang kepada entitas induknya pada harga perolehan, mungkin tidak menjual dengan persyaratan tersebut kepada pelanggan lain (PSAK No. 7; Revisi 2014)

Dalam PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” mengatur pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi tersebut, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan sendiri entitas induk. Salah satu pengungkapan yang diwajibkan adalah pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci.

Sesuai dengan latar belakang di buatnya PSAK No 7 berdasarkan pernyataan IAI bahwa posisi laporan keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak berelasi salah satunya adalah Manajemen kunci yang dapat dilihat melalui pengungkapan pembayaran manajemen kunci. Sehingga perlu dibuat peraturan mengenai pembayaran kompensasi tersebut. Walaupun Pengungkapan kompensasi manajemen kunci tersebut bersifat wajib, namun masih banyak beberapa perusahaan yang mengungkapkannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAI (Farahmita dan Amkyga; 2015).

Selain itu berdasarkan penelitian Basset et al. (2007), pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci sebagai salah satu transaksi pihak berelasi memiliki potensi timbulnya *moral hazard* pada manajemen sehingga dapat mengakibatkan konflik keagenan. Luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci dipengaruhi oleh efektivitas *corporate governance* (CG) dan kualitas audit perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai penyusun dan pengembang pedoman CG di Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dan menyebutkan asas-asas pelaksanaan CG yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam perusahaan. Asas transparansi mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan CG yang baik diharapkan dapat memberikan informasi dengan transparan kepada para pemegang saham. Selain itu pengawasan yang baik di perusahaan sebagai salah satu mekanisme CG

dapat mengurangi konflik keagenan dan menimbulkan *interest alignment* antara manajemen, pemegang saham pengendali, dan non-pengendali.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali *et al.* (2007) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan. Namun, penelitian Claessens *et al.* (2000) menemukan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga mengakibatkan ekspropriasi yang merugikan pemegang saham minoritas, dimana pemilik perusahaan mengambil keuntungan dari pihak minoritas dengan mengalihkan dana yang telah dihimpun kepada perusahaan lain dalam kelompok usaha yang sama.

Riset Farahmita (2012) sudah mencoba meneliti pengaruh keberadaan kepemilikan manajerial terhadap luasnya pengungkapan manajemen kunci. Namun demikian, riset tersebut belum mempertimbangkan bahwa kepemilikan manajerial di perusahaan Indonesia sebenarnya merepresentasikan kepemilikan pemegang saham pengendali. Hal ini sesuai dengan Claessens *et al.* (2000) bahwa perusahaan di negara-negara Asia sebagian besar merupakan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi yang sebagian besar dikendalikan oleh keluarga, yang biasanya menempatkan wakil keluarga sebagai direktur atau komisaris.

Selain itu, terdapat faktor CG internal lain seperti pada riset Utama (2004), yang menemukan bahwa komite audit yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selain faktor CG internal, penelitian

terdahulu juga menemukan bahwa CG eksternal seperti kualitas audit juga mempengaruhi luas pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, informasi yang diungkapkannya di laporan keuangan juga akan semakin luas (Basset *et al.* 2007). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Penelitian Bassett *et al.* (2007) dan Nelson dan Percy (2004) menemukan bahwa kualitas audit yang disajikan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib dengan lebih luas.

Selain itu ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi luas pengungkapan manajemen kunci tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan dapat mengungkapkan informasi kompensasi manajemen kunci dengan lebih luas pada laporan keuangan karena perusahaan besar lebih menjaga reputasinya dengan lebih transparan, mampu melaksanakan proses pengumpulan, klasifikasi dan menyebarkan informasi kepada public (Omar dan Simon, 2011), serta Agca dan Onder (2007)

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini memfokuskan pada pengaruh struktur *Corporate Governance* internal seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan efektivitas komite audit, selain itu ditambah faktor lain seperti kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap luasnya pengungkapan kompensasi yang diterima manajemen kunci dengan studi kasus penerapan PSAK No.7 (Revisi 2014). Peneliti menemukan bahwa studi pengaruh CG berdasarkan PSAK No. 7 masih terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Farahmita dan Akymga (2015) yang meneliti pengaruh struktur CG,

yaitu struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Penelitian ini menambah ukuran perusahaan sebagai variabel independennya dan memperbaiki pengukuran kepemilikan manajerial dalam Farahmita dan Akymga (2015). Selain itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Karena perbankan adalah suatu industri yang memiliki sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya.

Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga *intermediary*/perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi oleh bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bank tersebut (Rahmawati dkk, 2006).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul” **Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci perusahaan perbankan di Indonesia?

2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci perusahaan perbankan di Indonesia?
3. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci perusahaan perbankan di Indonesia?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci perusahaan perbankan di Indonesia?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci perusahaan perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur *Corporate Governance* internal seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan efektivitas komite audit, serta faktor lain seperti kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen pada perusahaan perbankan di Indonesia.

Selain berkontribusi dalam menambah literatur mengenai pengungkapan transaksi pihak berelasi di Indonesia, penelitian ini juga berkontribusi pada perkembangan penelitian mengenai dampak revisi PSAK sehubungan dengan konvergensi IFRS yang sedang berlangsung di Indonesia dan sebagai umpan balik penerapan PSAK No. 7 (Revisi 2014) terkait dengan kompensasi manajemen kunci.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi
 - Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun tesis atau yang akan melakukan penelitian mengenai Pengungkapan pihak-pihak berelasi khususnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci dan factor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi Praktisi
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Good Corporate governance* salah satunya dengan pengungkapan kompensasi manajemen kunci.
 - Hasil penelitian ini juga diharap berkontribusi pada perkembangan penelitian mengenai dampak revisi PSAK sehubungan dengan konvergensi IFRS yang sedang berlangsung di Indonesia dan sebagai umpan balik penerapan PSAK No. 7 (Revisi 2014) terkait dengan kompensasi manajemen kunci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika *principal* mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan, seperti manajer perusahaan atau dewan direksi, yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan *principal* adalah pihak yang mengevaluasi informasi, seperti pemegang saham. Jika kedua kelompok tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*.

Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, penggelapan sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan (Siallagan, 2006). Untuk mengatasinya *principal* dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktifitas agen yang menyimpang.

Di dalam hubungan keagenan, terdapat perjanjian bahwa agen setuju untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi *principal*, dan *principal* memberi imbalan atau kompensasi kepada agen. Pembayaran kompensasi manajemen kunci tidak terlepas dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan pembayaran kompensasi sebagai salah satu transaksi pihak berelasi memiliki dampak timbulnya *moral hazard* pada manajemen, sehingga dapat mengakibatkan konflik keagenan. Konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham tersebut dapat disejajarkan dengan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh manajer dan institusi, keberadaan komite audit dalam perusahaan, dan kualitas audit perusahaan, yang dianggap dapat meningkatkan transparansi dan luasnya pengungkapan informasi di Laporan Keuangan, terutama pengungkapan wajib mengenai kompensasi manajemen kunci.

2.1.2. Teori Stakeholders

Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholders* tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholders*, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholders* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeleminasi legitimasi *stakeholders* (Ardianto dan Machfudz, 2011).

Menurut Ghazali dan Chariri (2007), Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai suatu perusahaan sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder.

Diharapkan melalui teori stakeholder ini pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Begitu juga dengan pengungkapan laporan keuangan diharapkan lebih transparan dan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.3. PSAK No. 7 (Revisi 2014)

PSAK No 7 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut.

Pernyataan ini diterapkan dalam:

- a) Mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
- b) mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi;
- c) mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf a) dan b);
dan
- d) Menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut.

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk atau investor dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas, investee yang disajikan sesuai dengan PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian atau PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri. Pernyataan ini juga diterapkan untuk laporan keuangan individual.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”). Salah satu pengungkapan pihak berelasi yang perlu diungkapkan dalam PSAK no 7 yaitu pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

2.1.4. Kompensasi Manajemen Kunci

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi juga merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis (Sutrisno, 2002) Berdasarkan PSAK No 7, definisi kompensasi adalah seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan Kerja) termasuk imbalan

kerja yang menerapkan PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh entitas, atau untuk kepentingan entitas, atas imbalan jasa yang diberikan kepada entitas. Hal ini juga mencakup imbalan yang dibayarkan untuk kepentingan entitas induk terkait dengan entitas.

Kompensasi meliputi:

- a. Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji dan kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus (jika dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode) dan imbalan nonmoneter (seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan cuma-cuma atau melalui disubsidi) untuk pekerja yang ada saat ini;
- b. Imbalan pascakerja seperti pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja;
- c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar, cuti sabbatical, imbalan jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, dan bagi laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan (jika terutang seluruhnya lebih dari dua belas bulan pada akhir).

Manajemen Kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas (PSAK no 7).

Jadi kompensasi manajemen kunci adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh entitas, kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas.

Pengungkapan kompensasi manajemen kunci merupakan pengungkapan terhadap seluruh imbalan yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh entitas, kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas (PSAK No 7).

Berdasarkan PSAK No 7, pengungkapan kompensasi manajemen kunci diungkapkan secara total dan untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1) Imbalan Kerja Jangka Pendek:

Yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Kerja Jangka Pendek ini adalah; Gaji, iuran Jaminan Sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada periode akhir pelaporan), dan imbalan yang tidak berbentuk uang (imbalan kesehatan, rumah, mobil, barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi).

2) Imbalan Pasca Kerja:

Yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contoh dari Imbalan Pasca Kerja ini adalah : Imbalan Pensiun, Imbalan asuransi jiwa pasca kerja, imbalan kesehatan pasca kerja. Jika dikaitkan dengan penjelasan diawal tulisan ini, imbalan pasca kerja yang tercantum di perundangan ketenagakerjaan adalah; Imbalan Pensiun, Meninggal Dunia, Disability/cacat/medical unfit dan mengundurkan diri. Imbalan.

3) Kerja Jangka Panjang:

Yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Jangka Panjang ini adalah: Cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (*jubilee*) berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin terbuat dari emas dan lain-lain.

4) Pesangon:

Yaitu imbalan kerja yang diberikan karena perusahaan berkomitmen untuk: (1) Memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, atau (2) Menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela (*golden shake hand*).

5) Pembayaran berbasis saham:

Yaitu imbalan atau kompensasi berupa pemberian instrumen ekuitas atau berupa kewajiban yang jumlahnya ditentukan berbasis pada harga instrumen ekuitas, dan juga diterapkan pada semua transaksi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk pemberian instrumen ekuitas seperti saham dan opsi saham.

2.1.5. *Corporate Governance*

Corporate governance didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2002, *Corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir dari penerapan system ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya (Surya dan Yustiavandana 2006).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai penyusun dan pengembang pedoman CG di Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dan menyebutkan asas-asas pelaksanaan CG yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam perusahaan. Asas transparansi mengatur bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditur, dan *stakeholder's* lainnya. Perusahaan dengan CG yang baik diharapkan dapat memberikan informasi dengan transparan kepada para pemegang saham.

Selain itu, OECD (2004) juga menyebutkan adanya mekanisme pengawasan yang baik di dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme di dalam CG. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan menimbulkan *interest alignment* antara manajemen, pemegang saham pengendali, dan non-pengendali. Mekanisme CG yang dapat memengaruhi luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan antara lain kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan perusahaan, dan efektivitas komite audit (Farahmita dan Amkyga, 2015).

2.1.6. Kepemilikan Manajerial.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan (Purwandari & Purwanto, 2012). Menurut Junaidi (2006) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris. Besarnya presentase yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris dapat dilihat dalam laporan keuangan yang ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan Good Corporate Governance, karena berperan penting dalam penerapan Good Corporate governance dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Keberadaan kepemilikan manajerial menurut Jensen dan Meckling (1976) dapat menimbulkan *interest alignment* antara manajer dan pemegang saham sehingga manajemen diharapkan

dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan pemegang saham berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Teori Stakeholder kepemilikan manajerial dapat membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai suatu perusahaan sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Sehingga hal tersebut akan berdampak dengan pengungkapan pada laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Ghazali dan Chariri, 2007).

Shliefer dan Vishny (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dinilai dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Permasalahan yang terjadi antara agen dan prinsipal akan hilang apabila manajer sebagai pemegang saham perusahaan.

2.1.7. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan terkonsentrasi karena persentase jumlah saham yang dimiliki pihak keluarga paling besar (Hermawan, 2009).

Menurut Kamaliah *et al.* (2013) kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan yang bukan publik. Berdasarkan definisi di atas perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris, atau posisi manajemen lainnya. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga merupakan mayoritas jenis perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini umumnya

dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu (Ayub, 2008)

Dalam perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh keluarga pengaruh stakeholders sangat besar terutama pemegang saham. Karena stakeholder tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan.

Perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara (Anderson and Reeb, 2003). Harijono (2013) melakukan penelusuran kepemilikan keluarga dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan maka bisa saja perusahaan tersebut termasuk dalam kepemilikan oleh keluarga. Setelah ditelusuri maka dapat diketahui jika saham pengendali perusahaan tersebut adalah individu, maka bisa dikategorikan sebagai kepemilikan keluarga (Wahyudi, 2015).

2.1.8. Efektivitas Komite Audit

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia diatur berdasarkan SK Bapepam LK No. Kep. 29/PM/2004, yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas

pengawasan pengelolaan perusahaan. SK tersebut sudah diubah menjadi Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Per 1 Januari 2013, regulator yang menerbitkan peraturan bagi perusahaan publik bukan lagi Bapepam-LK tapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan tersebut antara lain mencakup struktur, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang bersal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Efektivitas komite audit sangat penting dalam membantu dewan komisaris terkait kredibilitas penyusunan laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas komite audit, mencakup: independensi, jumlah anggota yang memadai, aktivitas, kompetensi dalam bidang keuangan. Dengan sejumlah karakteristik tersebut, komite audit diharapkan dapat memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan dan berperan secara efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian laporan keuangan yang material.

2.1.9. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Audit quality oleh Kane dan Velury (2005) dalam Simanjuntak (2008), didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Banyak faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut seperti nilai akuntansi yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, termasuk fleksibilitas penggunaan dari *generally accepted accounting principles* (GAAP) sebagai suatu aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang digambarkan pada laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), yang dikeluarkan oleh IAI tahun 1994 dinyatakan bahwa kriteria atau ukuran mutu mencakup mutu profesional auditor. Kriteria mutu profesional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing meliputi independensi, integritas dan objektivitas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa audit bertujuan meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor.

2.1.10. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Berdasar *firm size*-nya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan *big* (besar) dan *small* (kecil) (Saiful dan Erliana, 2010). Dengan kata lain, ukuran Perusahaan merupakan market value dari sebuah perusahaan. Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan di kenal dalam masyarakat.

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang paling sering digunakan dalam beberapa literatur untuk menjelaskan luas tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel untuk menguji pengaruhnya dengan tingkat pengungkapan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan perusahaan (Fitriani, 2001; Johan dan Lekok, 2006; Sihite, 2010). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan karena perusahaan besar harus memenuhi public demand atas pengungkapan yang lebih luas (Halim et al., 2005). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung akan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil.

Teori agensi (*agency theory*) yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki biaya agensi (*agency cost*) yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Biaya agensi (*agency cost*) adalah biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham.

Perusahaan besar memiliki biaya agensi (*agency cost*) yang lebih besar karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi atau semakin luas pula rantai komando dalam perusahaan tersebut, sehingga biaya pengawasan yang timbul juga akan semakin besar. Untuk mengurangi biaya agensi (*agency cost*) tersebut, perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi atau akan melakukan pengungkapan yang lebih luas.

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar pula. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi itu sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga untuk menyajikan informasi yang lebih luas dibutuhkan biaya yang besar.

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Selanjutnya, Jogiyanto (2007:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menemukan bahwa atribut CG internal mempengaruhi kualitas pengungkapan. Penelitian oleh Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali *et al.* (2007) menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan. Namun, penelitian Claessens *et al.* (1999) menemukan bahwa perusahaan yang dikontrol oleh keluarga dan merupakan bagian dari kelompok usaha dapat mengakibatkan ekspropriasi yang merugikan pemegang saham minoritas, dimana pemilik perusahaan mengambil keuntungan dari pihak minoritas dengan mengalihkan dana yang telah dihimpun kepada perusahaan lain dalam kelompok usaha yang sama.

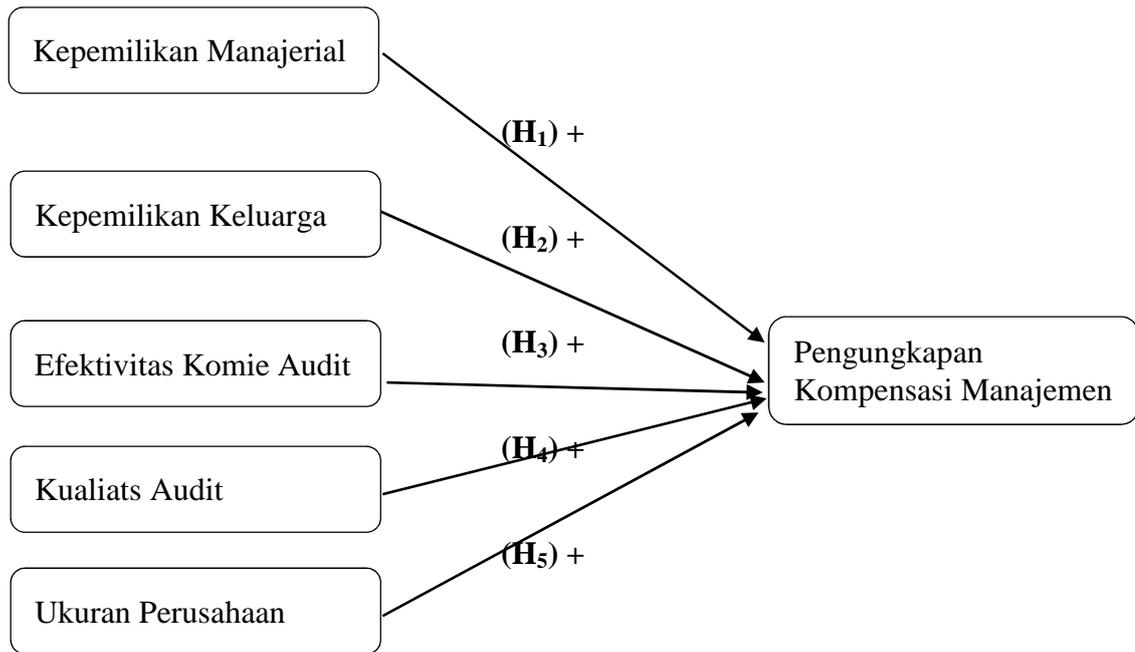
Riset Farahmita (2012) sudah mencoba meneliti pengaruh keberadaan kepemilikan manajerial terhadap luasnya pengungkapan manajemen kunci. Namun demikian, riset tersebut belum mempertimbangkan bahwa kepemilikan manajerial di perusahaan Indonesia sebenarnya merepresentasikan kepemilikan pemegang saham pengendali. Hal ini sesuai dengan Claessens *et al.* (2000) bahwa perusahaan di negara-negara Asia sebagian besar merupakan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi yang sebagian besar dikendalikan oleh keluarga, yang

biasanya menempatkan wakil keluarga sebagai direktur atau komisaris. Selain itu, terdapat faktor CG internal lain seperti pada riset Utama (2004), yang menemukan bahwa komite audit yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Selain faktor Corporate Governance tersebut, penelitian terdahulu juga menemukan bahwa faktor lain seperti kualitas audit dan Ukuran Perusahaan juga memengaruhi luas pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Semakin baik kualitas audit dan ukuran suatu perusahaan, informasi yang diungkapkannya di laporan keuangan juga akan semakin luas (Basset *et al.* 2007). Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Penelitian Bassett *et al.* (2007) dan Nelson dan Percy (2004) menemukan bahwa kualitas audit yang disajikan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP besar memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib dengan lebih luas.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Manajemen Kunci

Kepemilikan saham manajerial dinilai dapat mengatasi konflik keagenan, karena dapat mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer. Hal ini dapat terjadi karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil, dan akan ikut menanggung resiko atas kesalahan pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan semakin berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham, yang termasuk di dalamnya manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan agar dapat meyakinkan pihak eksternal untuk melakukan investasi. Salah satunya dengan mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di Laporan Keuangan yang dinilai

dapat memberikan gambaran kepada investor tentang pencapaian kinerja perusahaan, karena kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen kunci didasarkan atas pencapaian kinerja oleh manajemen kunci tersebut dalam memenuhi target perusahaan (Conyon & He, 2011).

Penelitian Farahmita dan Akmyga (2015) menyatakan bahwa struktur CG yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga relatif lebih mampu untuk mendorong manajemen untuk dapat memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib di laporan keuangannya dalam rangka menjaga reputasi perusahaan. Selain itu penelitian Purwandari dan Purwanto (2010) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap indeks Wallace (indeks pengungkapan laporan keuangan) salah satu dari indeks tersebut adalah pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

Dan berdasarkan hasil riset Morck dan Yeung (2003) menemukan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas dan transparan di Laporan Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama adalah:

H₁: Perusahaan dengan keberadaan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

2.4.2. Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan terkonsentrasi karena persentase jumlah saham yang dimiliki pihak keluarga paling besar (Hermawan, 2009).

Pada umumnya perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dapat ditemukan di pada perusahaan milik keluarga dimana perusahaan ini dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya terkonsentras pada keluarga tertentu.

Penelitian Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali *et al.* (2007) menemukan adanya pengaruh positif keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan.

Argumennya adalah karena keluarga dianggap lebih memiliki kepentingan jangka panjang untuk berinvestasi. Hal tersebut demi menjaga reputasi dan keberlangsungan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan keturunannya di masa depan.

Penelitian Farahmita dan Akmyga (2015) juga menyatakan bahwa struktur CG yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga relatif lebih mampu untuk mendorong manajemen untuk dapat memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib di laporan keuangannya dalam rangka menjaga reputasi perusahaan. Adanya kepemilikan keluarga di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan monitoring agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan. Semakin besar kepemilikan keluarga, maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Irfana, 2012).

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Al-Akra dan Hutchinson (2012) dan Ali *et al.* (2007) yang menemukan adanya pengaruh positif keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali terhadap pengungkapan wajib di laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis kedua adalah:

H₂: Perusahaan dengan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

2.4.3. Efektivitas Komite Audit dan Pengungkapan Manajemen Kunci.

Komite Audit berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 (2015) merupakan komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan bertugas untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan termasuk informasi di laporan keuangan, ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Selain itu, efektivitas komite audit sebagai salah satu mekanisme CG juga dapat memengaruhi luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Penelitian Zhang *et al.* (2007) menyebutkan bahwa komite audit yang bertugas dengan efektif dapat mendorong *internal control* perusahaan menjadi lebih baik. Praktik *internal control* yang baik diharapkan dapat mendorong kepatuhan perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi yang berlaku, salah satunya melalui pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Penelitian utama (2004) juga menyebutkan bahwa komite audit yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk

memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik. Salah satunya yaitu pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

Tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan akuntansi, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011). Oleh karena itu, dengan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan memastikan bahwa manajemen akan bertindak sesuai dengan kerangka peraturan sehingga akan mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan, dan membantu manajemen untuk menghasilkan suatu Laporan Keuangan yang berkualitas

Dan sesuai dengan penelitian Farahmita dan Akymga (2015) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit sangat penting dalam praktik internal control dan penyajian informasi keuangan sehingga diharapkan perusahaan dapat selalu mengembangkan efektivitas komite audit melalui pemenuhan kriteria komite audit berdasarkan Peraturan BEI No. KEP-305/BEJ/07-2004 dan Peraturan Bapepam LK No. IX.I.5. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃: Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap luasnya

pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

2.4.4. Kualitas Audit dan Pengungkapan Manajemen Kunci.

Selain factor internal yang disebutkan diatas, faktor eksternal perusahaan juga dapat memengaruhi luasnya pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen

kunci di laporan keuangan, yakni kualitas audit. Penelitian Basset *et al.* (2007) menyebutkan bahwa semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, maka informasi keuangan yang diungkapkan juga akan semakin luas. Pengukuran kualitas audit ditentukan melalui spesialisasi auditor yang mengaudit perusahaan tersebut.

Manfaat dilakukan audit atas laporan keuangan antara lain, menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah. Sehingga dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian integritas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen (Fakhrudin, 2016)

Perusahaan yang diaudit oleh auditor yang spesialis diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan dengan lebih luas karena lebih memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam mengaudit industri tertentu sehingga dapat lebih baik dan akan mendorong luasnya pengungkapan di laporan keuangan (Bassett *et al.* 2007; Nielson dan Percy 2004; Wang dan Chen 2004). Penelitian Farahmita (2012) mendukung pendapat tersebut di mana Farahmita (2012) menemukan pengaruh positif kualitas audit yang diukur dengan ukuran spesialisasi auditor terhadap luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat adalah:

H₄: Perusahaan dengan kualitas audit yang baik berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas.

2.4.5. Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Manajemen Kunci

Ukuran Perusahaan merupakan *market value* dari sebuah perusahaan. Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan di kenal dalam masyarakat (Farahmita dan Akymga (2015).

Selain itu, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan dapat mengungkapkan informasi kompensasi manajemen kunci dengan lebih Luas pada laporan keuangan karena perusahaan besar lebih menjaga reputasinya dengan lebih transparan, mampu melaksanakan proses pengumpulan, klasifikasi, dan menyebarkan informasi kepada publik (Omar dan Simon; 2011).

Selain itu temuan terkait rasio kompensasi manajemen kunci terhadap total aset seperti penelitian Farahmita (2012), Gao dan Kling (2012), dan Hermalin dan Weisbach (2008), menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kompensasi manajemen kunci terhadap total aset, maka perusahaan dapat mengungkapkan informasinya dengan lebih luas dan beragam Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima adalah:

H₅: Perusahaan dengan ukuran yang besar berpengaruh positif terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang lebih luas

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian *hypothesis testing* dengan menggunakan *causal study* di mana peneliti hendak menggambarkan faktor yang memengaruhi terjadinya perbedaan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan berdasarkan PSAK no 7 (Revisi 2014).

3.2. Sampel Penelitian

Untuk menguji hipotesis yang disebutkan di atas, peneliti memilih perusahaan yang akan diteliti berdasarkan kriteria:

- a. Perusahaan yang diteliti bergerak di bidang jasa perbankan.
- b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 s/d 2016.
- c. Perusahaan mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan tahun 2014 s/d 2016.
- d. Data sampel yang diolah sudah mengeluarkan data outlier. Data yang dinyatakan sebagai data outlier adalah data yang berada di luar rentang nilai 3 kali standar deviasi di atas atau di bawah rata-rata.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder berupa laporan tahunan dari 2014 s/d 2016 dan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2014 s/d 31 Desember 2016 yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia.

3.4. Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini tingkat luasnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan perusahaan i pada tahun t. Luasnya pengungkapan diukur dengan menggunakan skor seperti pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Farahmita (2012). Skor pengungkapan terbagi lima, yaitu:

1. Skor 0 diberikan apabila perusahaan tidak mengungkapkan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan
2. Skor 1 diberikan apabila perusahaan hanya menyajikan total kompensasi tanpa keterangan kategori imbalan.
3. Skor 2 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi masing-masing komisaris dan direktur
4. Skor 3 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dengan memberikan deskripsi/kategori imbalan
5. Skor 4 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan total kompensasi dan memberikan rincian sub jumlah per kategori imbalan kerja.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen yang akan diteliti adalah:

1. FAMOWN = kepemilikan keluarga, pengukuran variabel kepemilikan keluarga ini mengikuti pengukuran oleh Siregar dan Utama (2008) yaitu apabila perusahaan dikontrol oleh keluarga (kepemilikan oleh keluarga lebih dari 50%), maka perusahaan memperoleh skor 1, dan 0 apabila sebaliknya.
2. MANOWN = kepemilikan manajerial, diukur dengan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh komisaris maupun oleh direktur di perusahaan tersebut (Faramita; 2015)
3. KOMAUD = efektivitas komite audit; Variabel ini diukur dengan menggunakan *checklist* efektivitas komite audit (Lampiran 1) yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Pengukuran efektivitas ini dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari pertanyaan (*checklist*) yang disusun berdasarkan karakteristik komite audit, yaitu mencakup: *activity*, *size*, serta kompetensi dari komite audit. Total pertanyaan (*checklist*) untuk efektivitas komite audit terdiri dari 11 pertanyaan yang mencakup 3 kategori, diantaranya *audit committee activities*, *audit committee size* dan *audit committee expertise competence*.

Untuk setiap pertanyaan akan terdiri dari 3 kemungkinan penilaian yaitu:

- *Good* : diberi nilai 3 apabila setiap kriteria yang ada terpenuhi.
- *Fair* : diberi nilai 2 apabila hanya beberapa kriteria yang ada terpenuhi.
- *Poor* : diberi nilai 1 apabila tidak terdapat kriteria yang ada terpenuhi.

Setelah memperoleh nilai untuk setiap pertanyaan, maka skor untuk komite audit diperoleh dengan menjumlahkan total skor untuk masing–masing karakteristik kemudian dibagi dengan jumlah skor maksimal untuk mendapatkan sebuah angka yang akan digunakan dalam penelitian.

4. KA = kualitas audit, diukur dengan Spesialisasi Auditor. Pengkategorian auditor spesialis dan non-spesialis berdasarkan data persentase klien perusahaan go public yang diaudit oleh suatu KAP pada industri tertentu, kemudian dilakukan pembobotan (weighting) berdasarkan total aset perusahaan dengan rumus yang dikembangkan oleh Panjaitan (2014), sebagai berikut:

$$\text{Spesialisasi Auditor} = \frac{\text{Jumlah klien KAP di Industri tsb}}{\text{Jumlah seluruh emiten di industri tsb}} \times \frac{\text{jumlah aset klien KAP di industri tsb}}{\text{jumlah aset seluruh emiten di industri tsb}}$$

Suatu KAP dikatakan spesialis jika KAP tersebut menguasai 10% *market share*. Variabel Spesialisasi Auditor diukur dengan menggunakan dummy variabel. Jika suatu KAP tertentu menguasai 10% *market share* maka diberikan nilai 1 (spesialis), dan 0 jika tidak. Dalam penelitian Panjaitan (2014) menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mengaudit di industri tertentu tidak lebih dari 10 %, maka KAP yang menguasai market share 10 % atau lebih bias dikatakan auditor yang spesialis.

5. SIZE = ukuran perusahaan; diukur dengan menggunakan logaritma natural dari Total Aset Perusahaan (Farahmita, 2015). Logaritma natural dipilih untuk meratakan data dan menghindari rentang data yang terlalu jauh. Total aset dipilih dengan mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan.

3.5. Model Penelitian

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, efektivitas komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa uji normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual atau dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

1. Metode Grafik : Melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.
2. Metode uji One Sample Kolmogorov-Smirnov : Digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013), dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas, dapat juga digunakan cara lain, yaitu dengan:

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
2. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan buku kuadrat.

Nilai tolerance (a) dan *variance inflation factor* (VIF) ditentukan sebagai berikut:

1. Besar nilai tolerance (a) : $a = 0,1$
2. Besar nilai *variance inflation factor* (VIF) : $VIF = 10$

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung $< 0,1$ dan VIF hitung > 10 . Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a hitung $> 0,1$ dan $VIF < 10$

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi.

Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (D-W test) sebagai berikut:

1. $0 < d < d_l$ maka ditolak, karena tidak ada autokorelasi positif
2. $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak ada keputusan artinya Tidak ada autokorelasi positif
3. $4 - d_l < d < 4$, maka ditolak karena tidak ada autokorelasi negatif.
4. $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, maka tidak ada keputusan karena tidak ada autokorelasi negatif.

5. $du < d < 4 - du$, maka diterima, artinya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif .

Maka hasil uji autokorelasi harus memenuhi kriteria kelima agar dapat dinyatakan bahwa model bebas dari autokorelasi positif maupun negatif.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi linier berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain.

Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Sedangkan heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang.

3.5.2.5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.5.2.6 Uji Kelayakan Model Regresi

Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan statistik F dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel serta membandingkan nilai signifikansi. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan layak jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, jika sebaliknya maka model regresi dinyatakan tidak layak (Ghozali, 2013).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda dengan metode data silang (*cross section*) yang diolah menggunakan *software E-views* 9.0.

Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$\text{SCOMPDISC} = \beta_0 + \beta_1 \text{MANOWN} + \beta_2 \text{FAMOWN} + \beta_3 \text{KOMAUD} + \beta_4 \text{KAit} + \beta_5 \text{SIZE} + e$$

Keterangan:

SCOMPDISC = pengungkapan kompensasi manajemen kunci

β_0 = tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci

MANOWN = kepemilikan manajerial

FAMOWN = kepemilikan keluarga

KOMAUD = efektivitas komite audit

KA = kualitas audit

SIZE = ukuran perusahaan

e = error

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran struktur CG yang memengaruhi tingkat pengungkapan wajib mengenai kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2014) tentang Pihak-pihak Berelasi. Struktur CG yang diteliti adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, dan efektivitas komite audit, serta faktor lain seperti kualitas audit KAP dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hanya dua hipotesis (variabel Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit KAP) yang diterima dan tiga hipotesis (variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Keluarga, dan Efektivitas Komite Audit) ditolak. Adapun hasil analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa :
 - a. *Kepemilikan Manajerial* (MANOWN) tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap *Tingkat Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci* perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- b. *Kepemilikan Keluarga* (FANOWN) tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap *Tingkat Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci* perusahaan perbankan yang *go public* diBursa Efek Indonesia (BEI).
 - c. *Efektivitas Komite Audit* (KOMAUD) tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap *Tingkat Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci* perusahaan perbankan yang *go public* diBursa Efek Indonesia (BEI).
 - d. *Ukuran Perusahaan* (SIZE) berpengaruh secara positif signifikan terhadap *Tingkat Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci* perusahaan perbankan yang *go public* diBursa Efek Indonesia (BEI).
 - e. *Kualitas Audit KAP* (KA) berpengaruh secara positif signifikan terhadap *Tingkat Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci* perusahaan perbankan yang *go public* diBursa Efek Indonesia (BEI).
2. Variabel *Kepemilikan Manajerial* (MANOWN), *Kepemilikan Keluarga* (FAMOWN), *Efektivitas Komite Audit* (KOMAUD), *Ukuran Perusahaan* (SIZE), dan *Kualitas Audit KAP* (KA) berpengaruh terhadap *Tingkat Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci* perusahaan perbankan yang *go public* diBursa Efek Indonesia (BEI) sebesar sebesar 4,3 % sisanya 95,7 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian atau persamaan regresi ini.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Proksi kepemilikan manajerial menggunakan variable dummy sehingga mungkin tidak merepresentasikan pengaruh kepemilikan manajerial.

2. Sampel perusahaan dalam penelitian ini hanya industri perbankan. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke industri yang lain, misalnya industri manufaktur.
3. Hasil juga menunjukkan kecilnya pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yakni hanya sebesar 13.7 % dan sisanya sebesar 86,3% dipengaruhi oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model sehingga masih banyak variabel yang berpengaruh namun tidak dimasukkan dalam model ini.

5.3. Saran bagi penelitian selanjutnya

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan sehingga dapat lebih menunjukkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel perusahaan dari jenis perusahaan yang berbeda seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan lainnya sehingga dapat dilihat bagaimana variabel-variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependennya untuk jenis perusahaan yang berbeda.
3. Disarankan juga untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel yang berbeda selain menggunakan variabel dari penelitian ini menggunakan Mekanisme Corporate Governance yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agca, A. and S. Onder. 2007. Voluntary Disclosure in Turkey: A Study on Firms Listed in Istanbul Stock Exchange (ISE). *Problems and Perspective in Management*, 5 (3), 241-286.
- Akmyga, S.F. & Farahmita, A. (2015). Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, hal 19 – 36
- Al-Akra, M. and P. Hutchinson. 2012. Family Firm Disclosure and Accounting Reform. *Research in Accounting Regulation*, 25 (1), 101-107.
- Ali, A., T. Y. Chen, and S. Radhakrishnan. 2007. Corporate Disclosures by Family Firms. *Journal of Accounting and Economics*, 44 (1-2), 238-286.
- Anderson, R.C., & Reeb, D.M. (2003). Founding family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance*, 58(3), 1301-1328.
- Ardianto, Elvinaro dan Dindin M. Mahfudz, 2011. Efek Kedermawaan Pebisnis dan CSR Berlipat-lipat, PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, Jakarta.
- Ayub, Maydelina. 2008. Pengaruh Family Control Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Tesis. Universitas Indonesia.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan. 2004. *Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan.
- Bassett, M., P. S. Koh, and I. Tutticci. 2007. The Association between Employee Stock Option Disclosures and Corporate Governance: Evidence from an Enhanced Disclosure Regime. *The British Accounting Review*, 39 (4), 303-322.
- Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II)*. Jakarta: Salemba Empat

- Claessens, S., S. Djankov, and L. H. Lang. 2000. The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations. *Journal of Financial Economics*, 58 (1), 81-112.
- Conyon, M. & He, L. (2011). Executive compensation and Corporate Governance in China (ICS 2011-003). Retrieved from Cornell University, ILR School
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3 (3), 183-199.
- Faccio, M., L. Lang, and L. Young. 2001. Dividends and Expropriation. *American Economic Review*, 91 (1), 54–78.
- Farahmita, A. 2012. *Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci di Laporan Keuangan: Studi atas Revisi PSAK No. 7 (2010)*. Working Paper, Universitas Indonesia.
- Fatmawati, dkk. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Simposium Nasional Akuntansi IX
- Gao, Lei & Kling, Gerhard. (2008). Corporate governance and tunneling: Empirical evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*. 16. 591-605. 10.1016/j.pacfin.2007.09.001.
- Ghozali dan Chariri, 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamonangan Siallagan. Dan Mas'ud Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. SNA 9 Padang.
- Harijono, & Tanewski, G. A. (2012). Does Legal Transplantation Work? The Case of Indonesian Corporate Governance Reform. *Journal of Indonesian: Economics and Business* , 27 (1).
- Hermawan, A. A. 2009. *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Peran Monitoring Bank terhadap Kandungan Informasi Laba*. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Ho, S. S. and K. S. Wong. 2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10 (2), 139-156.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Irawati, L., & Fakhruddin, I. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Nasional*, XIV
- Irfana , Muhammad Jauhan. 2012. “Analisis Pegaaruh Debt Default, Kualitas Audit, Opinion Shopping Dan KepemilikanPerusahaan Terhadap Penerimaan Opinin Audit Going Concern”.Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976.Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4),305-360.
- Jogiyanto, Hartono. 2007. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE
- Junaidi, M. A. R .2006. pengaruh Kepemilikan Manajemen dan Kebijakan Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Thesis, unsyiah
- Kamaliah, et. al. 2013. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Akuntan Pemerintah (Studi Empiris Pada Akuntan BPKP)”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi*, Universitas Riau.
- Khalid Alsaeed, (2006) "The association between firm specific characteristics and disclosure: The case of Saudi Arabia", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 Issue: 5, pp.476-496,
- Lo, A. W. and R. M. Wong. 2011. An Empirical Study of Voluntary Transfer Pricing Disclosures in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30 (6),607-628.
- Morck, R. and B. Yeung. 2003. Agency Problems in Large Family Business Groups. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 27 (4), 367-382.
- Mujiyono dan Magdalena Nany. 2010. Pengaruh Leverage, Saham Publik, Size dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Volume 2 Nomor 2, Halaman 129-134
- Nelson, J. and M. Percy. 2004. *The Quality of Executive Stock Options Disclosures in Australian Annual Reports*. Working Paper, Queensland University of Technology.

- Omar, B. and J. Simon. 2011. Corporate Agregate Disclosure Practices in Jordan. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 27 (1), 166-186.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Permanasari, Meiryananda. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Informasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol.14 No.3
- Pujiningsih, Andiany Indra. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009). Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Purwandari, Arum dan Agus Purwanto. 2012. " Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Status Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia". *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 1 No-2.
- Renee B. Adams & Benjamin E. Hermalin & Michael S. Weisbach, 2010. "The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey," *Journal of Economic Literature, American Economic Association*, vol. 48(1), pages 58-107, March.
- Saiful dan Erliana, Uvi Elin. (2010). Equity Risk Premium Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 13, Purwokerto
- Siallagan, Hamonangan dan Mas'ud Machfoedz. (2006). "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". Simposium Nasional Akuntansi IX. Hal 1-23. Padang.
- Simanjuntak, Piter. (2008). Pengaruh Time Budget Pressure dan Resiko Kesalahan terhadap Penurunan Kualitas Audit. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Siregar, S. V. dan S. Utama. 2008. Type of Earnings Management and The Effect of Ownership Structure, Firm Size, and Corporate Governance Practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43 (1), 1-27.
- Utama, M. 2004. Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1), 61-79.

- Wahyudi, Dudi. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI)*, Vol. 2 (No.4), 05-17
- Wang, Y. Y. and H. W. Chen. 2004. Auditing Quality and Accounting Information Transparency Evidences from Chinese Listed Corporations. *Accounting Research*, 4, 9-15.
- Wang, D. 2006. Founding Family Ownership and Earnings Quality. *Journal of Accounting Research*, 44 (3), 619-656.
- Wulandari, N. P. Yani., I Ketut Budiarta. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 7. Nomor 3.
- Zhang, Y., J. Zhou, and N. Zhou. 2007. Audit Committee Quality, Auditor Independence, and Internal Control Weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26 (3), 300-327